

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG MASALAH

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang menghadapi berbagai masalah kependudukan, salah satunya yaitu perekonomian, dan seperti yang kita ketahui fenomena kemiskinan di Indonesia masih sulit dipecahkan. Kemiskinan menjadi masalah dalam pembangunan di setiap negara. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat merupakan kunci keberhasilan Pemerintah dalam menjalankan roda Pemerintahan. Kesejahteraan masyarakat sendiri merupakan situasi dimana seseorang bisa mendapatkan sesuatu hal yang di perlukan dalam segala aspek kehidupan. Didalam undang-undang 1945 juga sudah dijelaskan bahwa harus memajukan kesejahteraan umum.

Permasalahan kemiskinan yang sering terjadi antara lain rendahnya penghasilan dan kepemilikan yang mampu menjadi modal. Dampak dari kemiskinan tersebut dapat berpengaruh terhadap menurunnya kualitas sumberdaya manusia, sehingga produktivitas dan pendapatan menjadi rendah. Disamping itu dampak dari kemiskinan juga menyebabkan maraknya tindak kriminal di kota-kota besar, timbulnya pemukiman kumuh, menurunnya tingkat kesehatan dan lain-lain. Maka dari itu pembangunan masyarakat menjadi solusi untuk menanggulangi kemiskinan demi tercapainya kondisi yang lebih baik.

Kabupaten Bantul selalu memprioritaskan pembangunan pengentasan kemiskinan, hal tersebut juga didasari dengan selalu meningkatnya jumlah penduduk miskin yang fluktuatif. Melalui Perda Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2017, Pemerintah Kabupaten Bantul mengembangkan kebijakan pengentasan kemiskinan dengan berpedoman pada RJPD Kabupaten Bantul Tahun 2006-2025. Kebijakan Pengentasan Kemiskinan di Kabupaten Bantul diarahkan untuk mewujudkan kesejahteraan lahir dan batin, dengan memanfaatkan sumber daya lokal, berwawasan lingkungan, dan menitik beratkan pada pengurangan risiko bencana serta didasarkan pada keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Menurut (Badan Pusat Statistik Provinsi D.I. Yogyakarta, 2017) angka kemiskinan di Kabupaten Bantul belum berkurang secara signifikan, dikarenakan jumlah penduduk yang selalu bertambah. Pada tahun 2018 lalu jumlah penduduk miskin terdapat 134,84 ribu jiwa dengan tingkat kemiskinan 13,43%, tahun 2019 jumlah penduduk miskin terdapat 131,15 ribu jiwa dengan tingkat kemiskinan 12,92%, dan tahun 2020 jumlah penduduk miskin terdapat 138,66 ribu jiwa dengan tingkat kemiskinan 13,50 %.

Dalam upaya pengentasan kemiskinan Pemerintah Kabupaten Bantul akan terus mengupayakan program-program pemberdayaan dan bantuan langsung yang bertujuan untuk menurunkan angka kemiskinan. Salah satu program yang digunakan Pemerintah Kabupaten Bantul dalam upaya mengurangi angka kemiskinan yaitu dengan Program Keluarga Harapan

atau yang biasa disebut PKH. Program Keluarga Harapan sendiri yaitu program pemberian bantuan sosial bersyarat, bagi keluarga yang masuk dalam data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS). Disamping memiliki tujuan untuk mengurangi angka kematian bayi, kematian ibu hamil, dan kemiskinan, Program Keluarga Harapan memiliki tujuan meningkatkan kesetaraan gender (Razali & Putri, 2018). Syarat penerima Program Keluarga Harapan yang pertama ibu hamil dan ibu menyusui dengan masa kehamilan dua kali tidak lebih, kedua usia anak dini dalam satu kartu keluarga maksimal dua anak, ketiga anak usia sekolah dasar sampai sekolah menengah dalam satu kartu keluarga maksimal satu anak, keempat lansia dan penyandang disabilitas dalam satu kartu keluarga maksimal satu orang. Bantuan Program Keluarga Harapan ditentukan berdasarkan komponen dengan nilai bantuan yang berbeda-beda saat menerimanya. Untuk komponen kesehatan ibu hamil dan menyusui bantuan yang di terima sebesar Rp3.000.000, komponen anak usia 0-6 tahun bantuan yang di terima sebesar Rp3.000.000, komponen pendidikan anak sekolah dasar bantuan yang di terima sebesar Rp900.000, komponen pendidikan anak sekolah menengah pertama bantuan yang di terima sebesar Rp1.500.000, komponen anak sekolah menengah atas bantuan yang di terima sebesar Rp2.000.000, komponen penyandang disabilitas berat bantuan yang di terima sebesar Rp2.400.000, dan komponen lanjut usia 60 tahun yang sekarang di rubah menjadi usia 70 tahun ke atas bantuan yang di terima sebesar Rp2.400.000. Menurut data penduduk semester II berdasarkan

kepala keluarga dan jenis kelamin di Kapanewon Bantul tahun 2018 memiliki jumlah penduduk ± 22.158 jiwa,tahun 2019 memiliki jumlah penduduk ± 22.585 jiwa,dan 2020 memiliki jumlah penduduk ±22.709 jiwa. Jumlah penduduk diatas terdiri dari berbagai golongan penduduk miskin hingga menengah ke atas. Berikut rekapitulasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) di Kabupaten Bantul dan Kapanewon Bantul tahun 2018-2020 :

Tabel 1.1
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kabupaten Bantul Tahun 2018-2020

No	Kapanewon	Tahun		
		2018	2019	2020
1.	Bambanglipuro	15.638	14.784	12.637
2.	Banguntapan	19.694	17.450	15.551
3.	Bantul	15.438	14.231	12.341
4.	Dlingo	16.960	15.957	14.518
5.	Imogiri	24.227	22.966	21.458
6.	Jetis	54.046	17.142	15.383
7.	Kasih	22.452	21.543	18.639
8.	Kretek	8.401	8.044	7.131
9.	Pajangan	17.797	16.630	19.906
10.	Pandak	23.696	21.878	15.711
11.	Piyungan	15.688	15.128	13.603
12.	Pleret	16.639	15.705	14.916
13.	Pundong	14.831	14.125	12.882
14.	Sanden	11.583	11.031	9.369
15.	Sedayu	15.502	14.608	13.456
16.	Sewon	22.911	20.890	18.968
17.	Srandakan	12.053	11.539	10.562

Tabel 1.1 DTKS Kab. Bantul 2018 - 2020 1

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul.

Tabel 1.2
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial Kapanewon Bantul Tahun
2018-2020

No	Nama Kalurahan	Tahun		
		2018	2019	2020
1.	Bantul	2.956	2.715	2.376
2.	Palbapang	4.097	3.843	3.027
3.	Ringinharjo	2.216	2.039	1.824
4.	Sabdodadi	2.012	1.843	1.653
5.	Trirenggo	4.157	3.791	3.461

Tabel 1.2 DTKS Kap. Bantul 2018 - 2020 1

Sumber : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Bantul.

Menurut (Sofianto, 2020) disetiap program memiliki dampak negatif dan positif, yang menjadi dampak positif dari Program Keluarga Harapan yaitu dapat membantu meringankan beban finansial untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, sedangkan dampak negatifnya yaitu pendataan calon penerima Program Keluarga Harapan belum sesuai sasaran yang disebabkan tidak validnya data dan banyak dari penerima Program Keluarga Harapan yang masih salah dalam merealisasikan dana dari program tersebut. Adanya Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bantul dijalankan sejak tahun 2008, dimana saat itu hanya beberapa Kapanewon yang ikut melaksanakan program tersebut dan hingga saat ini Program Keluarga Harapan mengalami pertumbuhan yang sangat luas (Say, 2017). Menurut (Ninla Elmawati Falabiba, 2019) permasalahan kecemburuan sosial juga sering kali di temui dalam Program Keluarga Harapan, hal tersebut ditunjukkan dengan adanya aksi protes atau timbulnya gosip yang berdampak terhadap ketidaknyamanan seseorang.

Melihat angka kemiskinan di Kabupaten Bantul masih tinggi, maka sangat jelas Kapanewon Bantul juga termasuk daerah yang sedang mengalami permasalahan kemiskinan. Kapanewon Bantul memiliki lima Kalurahan yang terdiri dari Kalurahan Palbapang, Ringinharjo, Bantul, Trirenggo, dan Sabdodadi. Mayoritas pekerjaan masyarakat di Kapanewon Bantul yaitu sebagai buruh lepas, karyawan swasta, dan pengurus rumah tangga, namun masih banyak juga masyarakat yang belum memiliki pekerjaan. Adanya Program Keluarga Harapan tidak sepenuhnya dapat mengurangi permasalahan kemiskinan, tapi setidaknya bisa membantu meringankan kebutuhan masyarakat yang kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan ekonominya. Berikut data graduasi mandiri di Kapanewon Bantul tahun 2018 - 2020:

Tabel 1.3
Data Graduasi Mandiri di Kapanewon Bantul Tahun 2018-2020

No	Tahun	Jumlah KPM PKH	Tahap			
			1	2	3	4
1	2018	3802	-	-	-	11
2	2019	3664	5	4	8	16
3	2020	3372	6	14	12	6

Tabel 1.3 Data Graduasi Mandiri 1

Sumber : Koordinator PKH Kabupaten Bantul

Berdasarkan data, keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan di Kapanewon Bantul setiap tahunnya mengalami penurunan. Pada tahun 2018 Program Keluarga Harapan di Kapanewon Bantul sudah berjalan dengan baik namun belum mengalami penurunan yang signifikan dikarenakan masyarakat masih belum paham mengenai Program Keluarga

Harapan, beberapa pendamping juga belum mempunyai teknik dalam memberikan motivasi dan sebagai fasilitator. Maka perlu adanya bimbingan teknis motivator dan fasilitator yang difasilitasi dari pemerintah daerah. Pada tahun 2019 Program Keluarga Harapan di Kapanewon Bantul sudah berjalan dengan baik, banyak keluarga penerima manfaat yang sudah memahami terkait Program Keluarga Harapan karena itu banyak keluarga penerima manfaat yang mengundurkan diri dari program karena merasa dirinya sudah mampu. Pada tahun 2020 pelaksanaan Program Keluarga Harapan sudah berjalan sesuai target, hal tersebut dibuktikan dengan penurunan keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan yang cukup signifikan. Penurunan tersebut didukung dengan pembaruan data keluarga penerima manfaat, dimana anak yang sudah lulus sekolah dan keluarga penerima manfaat meninggal dunia dianggap hangus menjadi keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian pada pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kapanewon Bantul tahun 2018 – 2020 dengan tujuan ingin mengkaji lebih mendalam mengenai implementasi kebijakan dalam keberhasilan pelaksanaan Program Keluarga Harapan, mengingat Kapanewon Bantul terletak di pusat Pemerintahan Kabupaten Bantul sehingga dapat menjadi cerminan bagi Kapanewon lain di Kabupaten Bantul dalam melaksanakan Program Keluarga Harapan.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan hasil uraian yang terdapat pada latar belakang masalah, dapat dikemukakan bahwa permasalahan yang akan diteliti adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan Program Keluarga Harapan terhadap penurunan angka kemiskinan di Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul tahun 2018-2020 ?

1.3. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui pelaksanaan Program Keluarga Harapan yang ada di Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul.
2. Untuk mengungkapkan implementasi Program Keluarga Harapan yang ada di Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul.
3. Untuk mengetahui faktor yang mendukung dalam berjalannya Program Keluarga Harapan khususnya di Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul.

1.4. MANFAAT PENELITIAN

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada kajian yang berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat menjadi tolak ukur Pemerintah dalam mengambil keputusan maupun kebijakan dalam menjalankan program pengentasan masyarakat miskin, dan sebagai evaluasi masyarakat dalam berpartisipasi untuk menyukseskan program Pemerintah.

1.5. TINJAUAN PUSTAKA

Berikut studi-studi kajian terdahulu yang berkaitan dengan program penanggulangan kemiskinan dan dapat dijadikan bahan acuan penulis dalam melakukan penelitian khususnya terkait analisis Program Keluarga Harapan.

Tabel 1.4
Tinjauan Pustaka

No	JUDUL	HASIL PENELITIAN
1	<p>Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kalurahan Bandar Sono Kecamatan Nibung Hangus Kabupaten Batu Bara.</p> <p>Sumber : JUPIIS:Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial, 12 (1) (2020): 75-82 https://doi.org/10.24114/jupiis.v12i1.15747</p>	<p>(Santi & Pinem, 2020) Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 12 keluarga penerima manfaat di Kalurahan Bandar Sono yang memenuhi syarat sebagai penerima program keluarga harapan. Pelaksanaan program keluarga harapan dalam bidang pendidikan dan Kesehatan berjalan baik ,hal tersebut dibuktikan para keluarga penerima manfaat memenuhi tanggungjawabnya sebagai keluarga penerima manfaat program keluarga harapan.</p>
2	<p>Efektifitas Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga.</p> <p>Sumber : Jurnal Comm-Edu e-ISSN : 2615-1480 p-ISSN : 2622-5492 Volume 2 Nomor 1, Januari 2019 https://journal.ikipsiliwangi.ac.id/index.php/comm-edu</p>	<p>(Luthfi, 2019) Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektifitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kalurahan Margajaya Kecamatan Ngamprah KBB,sudah berjalan cukup baik. Ketepatan dalam perealisasiian dana yang diterima keluarga penerima manfaat dan sadarnya keluarga penerima manfaat akan pentingnya Kesehatan dan Pendidikan,membuktikan bahwa proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan berjalan baik.</p>
3	<p>Implementasi Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kelurahan Sepan Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara.</p> <p>Sumber : eJournal Ilmu Pemerintahan, 2019, 7 (3): 1365-1378 ISSN 2477-2458 (online), ISSN 2477-2631 (cetak), ejournal.ipfisip-unmul.ac.id. https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/?p=3243</p>	<p>(Azizah, 2019) Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kalurahan Sepan disetiap tahapannya sudah berjalan dengan baik. Kurangnya SDM dan sarana prasarana menjadi faktor penghambat Program Keluarga Harapan,seandainya faktor pendukung Program Keluarga Harapan yaitu adanya komunikasi yang baik antara penyelenggara program dan penerima program.</p>

4	<p>Efektivitas Program Keluarga Harapan (PKH) Terhadap Penerima Bantuan di Kalurahan Laliko Kecamatan Campalagian Kabupaten Polewali Mandar.</p> <p>Sumber : J-ALIF Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam Vol.5,No.2, November 2020 p-ISSN: 2541-5212 e-ISSN: 2541-5220 http://dx.doi.org/10.35329/jalif.v5i2</p>	<p>(Muin Rahmah, 2020) Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa efektifitas pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kalurahan Laliko belum berjalan dengan baik. Hal tersebut di buktikan dengan adanya rasa ketergantungan masyarakat terhadap bantuan Program Keluarga Harapan,selain itu tidak tepatnya masyarakat dalam merealisasikan dana Program Keluarga Harapan.</p>
5	<p>Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda.</p> <p>Sumber : eJournal Ilmu Pemerintahan , 2018, 6 (4): 1439-1550 ISSN 2477-2458(online), ISSN 2477-2631 (cetak) ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id https://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/?p=2925</p>	<p>(Andira et al., 2018) Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan Program Keluarga Harapan disetiap tahapannya berjalan secara baik,sehingga menimbulkan dampak positif terhadap masyarakat.Kurangnya sarana prasarana menjadi faktor penghambat pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda.</p>
6	<p>Analisis Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Di Kalurahan Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak.</p> <p>Sumber : Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Adminsitration dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo https://doi.org/10.37606/publik.v8i1.150</p>	<p>(Siswati et al., 2019) Hasil penelitian menunjukan bahwa hambatan di Kalurahan Kota Rantang Kecamatan Hamparan Perak yaitu, sulitnya dalam proses pengecekan & pembinaan karena sulit untuk mengumpulkan keluarga penerima manfaat.</p>
7	<p>Evaluasi Pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) Dalam Pengentasan Kemiskinan Di Kalurahan Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun Tahun 2018.</p>	<p>(Razali & Putri, 2018) Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa menurut indikator evaluasi program,proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kalurahan Sungai Asam Kecamatan Belat Kabupaten Karimun tahun 2018 berjalan</p>

	<p>Sumber : Jurnal Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora Universitas Karimun,tahun 2018 https://doi.org/10.0506/jkg.v1i1.30</p>	dengan baik.
8	<p>Peran Pendamping Sosial Dalam Penanganan Konflik Keluarga Penerima Manfaat Program Keluarga Harapan.</p> <p>Sumber : Jurnal Sosiologi Pendidikan Humanis. Volume 5, No 1, Juli 2020. P-ISSN : 2502 – 7875, E-ISSN : 2527-5879. http://journal2.um.ac.id/index.php/jsph</p>	(Nurchotimah et al., 2020) Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab konflik dalam Program Keluarga Harapan di Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas yaitu,munculnya rasa kecemburuan sosial dari masyarakat yang tidak mendapatkan kuota bantuan Program Keluarga Harapan. Melihat hal tersebut pendamping yang berperan sebagai fasilitator memberikan mediasi kepada masyarakat.
9	<p>Implementasi Kebijakan Program Keluarga Harapan (PKH) Dilihat Dari Aspek Sumber Daya.</p> <p>Sumber : JAPB : Volume 3 Nomor 2, 2020. https://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB/article/view/297</p>	(Fitria, Rizki; Ifansyah, Noor Muhammad; Firdaus, 2020) Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan di Mangkusip Kecamatan Tanta, berjalan cukup baik dilihat dari aspek sumber dayanya dengan presentase 35,3%.
10	<p>Implementasi Program Keluarga Harapan Pada Aspek Sumberdaya Dalam Bidang Pendidikan di Desa Bahungin Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong.</p> <p>Sumber : JAPB : Volume 3 Nomor 2, 2020. https://jurnal.stiatabalong.ac.id/index.php/JAPB/article/view/302</p>	(Norbayah et al., 2020) Hasil menunjukkan bahwa Program Keluarga Harapan di Kecamatan Kelua Kabupaten Tabalong, pada aspek sumber daya dalam bidang Pendidikan memiliki presentase 46,04% yang artinya cukup baik. Sedangkan hambatan pada aspek sumberdaya dalam bidang Pendidikan yaitu terletak pada isi kebijakan dan informasi.

Tabel 1.4 Tinjauan Pustaka 1

1.6. KERANGKA DASAR TEORI

1.6.1. Kebijakan Publik

1. Dalam (Hariani, 2020), Charles O Jones dalam Agustino Leo (2008:8) mengemukakan bahwa kebijakan publik yaitu aktivitas Pemerintah dalam mengatasi permasalahan publik yang memuat faktor-faktor sebagai berikut:
 - a. Suatu sasaran yang ingin dicapai (goals).
 - b. Uraian kegiatan program untuk menjelaskan sasaran yang ingin dicapai (plans/proposals).
 - c. program untuk mencapai sasaran yang diinginkan.
 - d. Detail tindakan yang dipilih untuk monitoring evaluasi dalam mencapai sasaran.
2. Dalam (Tahir, 2018) Woll (1996) mengemukakan bahwa kebijakan publik yaitu tindakan yang dilakukan Pemerintah dalam menyesuaikan permasalahan didalam masyarakat, baik dilakukan secara langsung oleh Pemerintah maupun melalui Lembaga Sosial. Dampak dari tindakan yang dilakukan Pemerintah yaitu :
 - a. Dalam menggunakan kekuatan publik pemilik kebijakan akan membuat pilihan kegiatan yang bertujuan untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat.
 - b. Pengaturan, penganggaran, pembentukan personil dan pembuatan regulasi oleh Pemerintah sebagai output kebijakan untuk mempengaruhi kehidupan masyarakat.

- c. Dampak kebijakan sebagai pengaruh pilihan kebijakan dalam mengubah kehidupan masyarakat
3. Dalam (Suwitri, 2008) Amara Raksasataya (1976) mengartikan kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, suatu kebijakan memuat 3 (tiga) elemen yaitu:
 - a. identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai.
 - b. taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
 - c. penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi.
4. Dalam (Abdal, 2015) Anderson (1975) mengemukakan bahwa kebijakan publik yaitu kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pembuat kebijakan, dimana implikasi dari kebijakan tersebut adalah :
 - a. Kebijakan publik memiliki tujuan yang mengarah terhadap sasaran yang ingin dicapai.
 - b. Kebijakan publik memuat keputusan-keputusan Pemerintah.
 - c. Kebijakan publik merupakan tindakan secara nyata dari Pemerintah.
 - d. Kebijakan publik yang dipilih Pemerintah bersifat positif dan negatif. Maksud dari bersifat positif dan negatif yaitu tindakan yang boleh dilakukan oleh Pemerintah terkait permasalahan

tertentu, dan keputusan yang tidak boleh dilakukan oleh Pemerintah.

- e. Kebijakan publik menurut Anderson dapat diartikan sebagai proses kinerja pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan di masyarakat.

1.6.2. Implementasi Kebijakan

1. Dalam (Aneta, 2012) Charles O. Jones (1996:166) mengemukakan bahwa mengemukakan bahwa implementasi kebijakan yaitu suatu kegiatan dalam mengoperasikan program menggunakan tiga kegiatan utama sebagai berikut :
 - a. Organisasi adalah perencanaan awal untuk menjalankan program terkait sumber daya dan sarana prasarana.
 - b. Interpretasi adalah membuat program menjadi rencana dan pengarahan yang tepat untuk dilaksanakan.
 - c. Aplikasi adalah perealisasi kegiatan yang sudah direncanakan seperti pengadaan barang dan jasa.
2. Dalam (Putri et al., 2020) Van Meter and Van Horn (1975), mendefinisikan implementasi kebijakan, merupakan tindakan yang digunakan baik individu atau kelompok-kelompok pejabat Pemerintah atau swasta, yang diarahkan agar dapat tercapainya suatu tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Dalam (Matualage, 2015)

model implementasi menurut George C. Edward III (Nugroho 2008 : 447) sebagai berikut :

- a. Komunikasi yaitu proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan.
 - b. Sumberdaya yaitu ketersediaan sumber daya pendukung, khususnya sumber daya manusia.
 - c. Disposisi yaitu kesediaan dari para implementor untuk carry out kebijakan publik tersebut.
 - d. Struktur birokrasi yaitu kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan publik.
3. Dalam (Imronah, 2019) Grindle (1980: 7) mengemukakan bahwa, implementasi adalah metode umum aktivitas administratif suatu program yang dapat diteliti. Model implementasi menurut Grindle yaitu implementasi sebagai proses politik dan administratif. Model tersebut menjelaskan langkah pengambilan keputusan yang dilakukan oleh berbagai pihak, dengan hasil akhir yang sudah ditentukan oleh materi program yang telah dicapai dan interaksi para pembuat keputusan dalam konteks politik administratif. Proses politik dibuktikan melalui langkah pengambilan keputusan dengan adanya keterlibatan dari pihak politik, sedangkan langkah manajemen dapat dilihat melalui proses umum tindakan manajemen dengan melihat tingkat program tertentu.

1.6.3. Program Keluarga Harapan

1. Pengertian Program Keluarga Harapan

Menurut (Royani, Yuliatin, & Mustiah, 2020) Program Keluarga Harapan yang merupakan pengembangan sistem perlindungan sosial yang dapat meningkatkan dan membantu rumah tangga miskin dalam hal mendapatkan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan dasar dengan harapan program ini akan dapat mengurangi kemiskinan.

Menurut (Najidah Nurul, 2019) Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi kesejahteraan sosial dan ditetapkan sebagai Keluarga Penerima Manfaat (KPM) PKH.

Keluarga Penerima Program Keluarga Harapan yang sudah terdaftar dalam fasilitas Pendidikan dan Kesehatan wajib mendatanginya. Keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan dari komponen Pendidikan bertanggung jawab mendaftarkan, dan memantau anak dari keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan dalam menjalankan pendidikannya. Sedangkan keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan dari komponen Kesehatan meliputi pemeriksaan kehamilan untuk ibu hamil, imunisasi untuk balita,serta perbaikan gizi anak (balita & prasekolah),lansia,dan penyandang disabilitas.

2. Mekanisme Penyaluran Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan

Menurut (Republik Indonesia, n.d.) Tahapan dalam penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan yaitu :

- a. Pemnuatan rekening keluarga penerima manfaat
- b. Sosialisasi dan edukasi.
- c. Pemberian kartu keluarga sejahtera (KKS) kepada keluarga penerima manfaat.
- d. Proses penyaluran dana Program Keluarga Harapan keluarga penerima manfaat.
- e. Pencairan dana yang dilakukan oleh keluarga penerima manfaat melalui agen terdekat maupun ATM.
- f. Rekonsiliasi hasil penyaluran bantuan sosial Program Keluarga Harapan.
- g. Monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penyaluran bantuan Program Keluarga Harapan.

1.6.4. Kemiskinan

1. Definisi Kemiskinan

Dalam (Suyanto, 2001) menurut Schiller (1979),kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk mendapatkan barang-barang dan pelayanan-pelayanan yang memadai untuk memenuhi kebutuhan sosial yang terbatas.

Dalam (Alia Akhmad, 2021) Friedman (1979) mengemukakan bahwa, kemiskinan adalah ketidaksamaan dalam mendapatkan dasar kekuasaan sosial yang meliputi beberapa point yaitu :

- a. Tidak adanya aset kepemilikan yang tetap.
- b. Keuangan yang tidak bisa untuk mencukupi kebutuhan hidup.
- c. Tidak memiliki organisasi sosial yang berguna untuk meraih tujuan bersama.
- d. Tidak memiliki jaringan dalam mencari pekerjaan, dan lain-lain.
- e. Minimnya informasi yang berguna dalam kehidupan sehari-hari.

2. Jenis-Jenis kemiskinan

Menurut (Suryawati, 2005) Kemiskinan dapat dibagi dalam empat bentuk, yaitu:

- a. Kemiskinan absolut : kemiskinan yang disebabkan oleh ketidakmampuan seseorang dalam memenuhi kebutuhan hidup saat itu juga maupun kedepannya.
- b. Kemiskinan relatif : kemiskinan yang disebabkan oleh adanya ketimpangan sosial yang terjadi di daerah tertinggal.
- c. Kemiskinan kultural : kemiskinan yang disebabkan oleh sifat seseorang yang tidak bisa berfikir secara maju untuk kehidupannya.
- d. Kemiskinan struktural : kemiskinan yang terjadi karena masyarakat tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan sistem sosial budaya maupun sosial politik.

3. Penyebab Kemiskinan

Menurut (Ulya, 2018) Kemiskinan merupakan siklus panjang yang masih membutuhkan pemecahan yang kompleks dan mendetail, sehingga dalam hal ini perlu adanya identifikasi akar/faktor penyebab kemiskinan itu sendiri, sehingga akan teridentifikasi solusi untuk mengentaskan kemiskinan, diantara faktor-faktor penyebab kemiskinan itu sendiri terjabarkan dari berbagai sumber, salah satu sumber referensi menyebutkan faktor-faktor penyebab kemiskinan adalah:

- a. Pertama, yaitu minimnya lapangan pekerjaan, sehingga sulit untuk mendapatkan pekerjaan. Sedangkan jumlah pengangguran di Indonesia terus bertambah. Dampak dari permasalahan tersebut akan memicu bertambahnya keluarga miskin.
- b. Kedua, yaitu terjadinya bencana alam yang menyebabkan hilangnya mata pencaharian dan hilangnya lahan akibat pembangunan.
- c. Ketiga, yaitu penyelewengan terhadap dana bantuan sosial yang dilakukan oleh para petinggi, sehingga banyak masyarakat miskin yang putus sekolah sehingga tidak bisa melanjutkan pendidikannya dan minimnya akses pelayanan Kesehatan

karena keterbatasan biaya. Hal tersebut tentu akan tetap menepatkan masyarakat miskin pada garis kemiskinan.

- d. Keempat, yaitu masyarakat tidak bisa berkembang kearah yang lebih baik lagi, karena masyarakat tidak diikutsertakan dalam proses sosial politik. Sehingga timbul adanya marginalisasi.

4. Indikator-Indikator Kemiskinan

Dalam (Hermawati Istiana, 2015) Kriteria kemiskinan menurut Departemen Sosial (2007) antara lain:

- a. Penghasilan yang minim.
- b. Terbatasnya pemilikan tempat tinggal layak huni.
- c. Pendidikan dan keterampilan yang rendah.
- d. Hubungan sosial dan akses informasi terbatas.
- e. Terbatasnya dalam mengakses informasi dan berhubungan sosial.
- f. Penolong persalinan oleh tenaga-tenaga tradisional, yaitu dukun, keluarga atau tetangga
- g. Penduduk yang tidak memiliki air bersih dan sanitasi.
- h. Angka kesakitan, yaitu proporsi penduduk yang mempunyai gangguan kesehatan sehingga menyebabkan terganggunya aktivitas sehari-hari.
- i. Angka pengangguran adalah proporsi penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja yang sedang mencari pekerjaan, mempersiapkan suatu usaha, tidak mencari pekerjaan karena

merasa tidak mungkin untuk mendapatkan pekerjaan, dan sudah mendapat pekerjaan tetapi belum memulai pekerjaan.

1.7. DEFINISI KONSEPTUAL

1.9.1. Kebijakan publik adalah keputusan apapun yang dipilih Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan banyak orang.

1.9.2. Konsep implementasi adalah penyedia sarana yang berfungsi untuk melakukan suatu kegiatan yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap suatu kegiatan tersebut.

1.9.3. Program Keluarga Harapan adalah suatu program yang di keluarkan Pemerintah untuk menanggulangi kemiskinan. Penerima program ditujukan khusus kepada keluarga miskin agar tetap mendapatkan fasilitas Kesehatan dan Pendidikan yang layak.

1.9.4. Kemiskinan adalah keadaan dimana terjadi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan primer,sekunder,tersier seperti makanan,pakaian,tempat berlindung,pendidikan,dan kesehatan.

1.8. DEFINISI OPERASIONAL

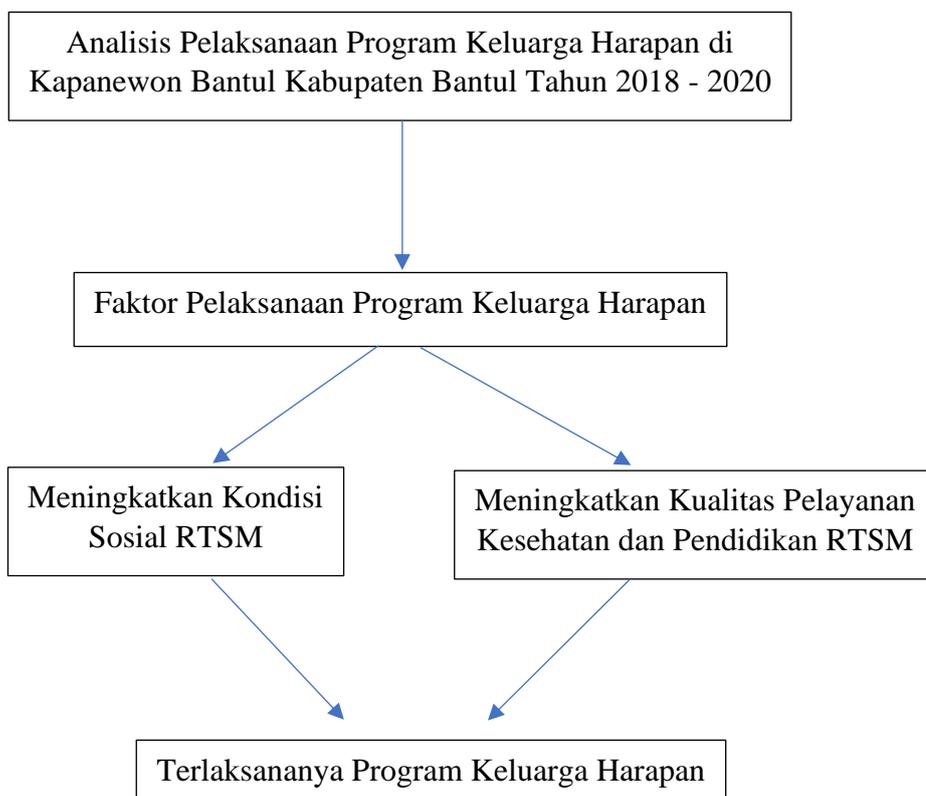
Tabel 1.5
Definisi Operasional

NO	VARIABEL	INDIKATOR	PARAMETER
1.8.1.	Kebijakan Publik	Identifikasi dari tujuan yang ingin dicapai	Mengurangi angka kemiskinan di Kapanewon Bantul melalui Program Keluarga Harapan.
		Taktik atau strategi dari berbagai langkah untuk mencapai tujuan yang diinginkan	Pemberian bantuan berupa pelayanan Kesehatan dan Pendidikan.
		Penyediaan berbagai input untuk memungkinkan pelaksanaan secara nyata dari taktik atau strategi	Penyediaan fasilitas dalam pelaksanaan Program Keluarga Harapan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.
1.8.2.	Implementasi Kebijakan	Komunikasi	Tranformasi pemahaman dalam sosialisasi terhadap implementasi Program Keluarga Harapan dari pendamping kepada keluarga penerima manfaat Program Keluarga Harapan.
		Sumberdaya	Adanya sarana dan prasarana yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan dari implementasi kebijakan Program Keluarga Harapan.
		Disposisi	Sikap pelaksana dalam mendukung suatu implementasi kebijakan. Menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang- orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain.

		Struktur birokrasi	Struktur organisasi yang berpengaruh secara signifikan terhadap implementasi Program Keluarga Harapan agar berjalan dengan sesuai yang diharapkan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah dengan menggunakan Standart Operating Procedure (SOP).
1.8.3.	Program Keluarga Harapan	Bantuan Sosial	Pemberian bantuan tunai kepada komponen-komponen yang di tentukan dalam Program Keluarga Harapan.
1.8.4.	Kemiskinan	Penurunan angka kemiskinan	Kesejahteraan masyarakat meningkat melalui Program Keluarga Harapan.

Tabel 1.5 Definisi Operasional 1

Bagan 1.1
Alur Penelitian



Bagan 1.1 Alur Penelitian 1

1.9. METODE PENELITIAN

1.9.5. Metode Penelitian

Sehubungan dengan penelitian yang telah dilaksanakan, peneliti menggunakan penelitian kualitatif. Dalam (Suwarsono, 2016) Lichtman (2013:7) mengemukakan bahwa penelitian kualitatif merupakan suatu istilah yang umum (generik), yang mengandung pengertian bahwa itu penelitian kualitatif adalah suatu cara untuk mengetahui sesuatu di mana seorang peneliti mengumpulkan, mengorganisasikan, dan menginterpretasi informasi yang diperoleh dari manusia dengan menggunakan mata atau telinga sebagai penyaring. Seringkali penelitian itu melibatkan wawancara-wawancara mendalam dan/atau observasi-observasi terhadap manusia dalam situasi setting yang alamiah, online, atau sosial.

1.9.6. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, dengan menekankan pada aspek pemahaman secara mendalam terhadap suatu masalah dari pada melihat permasalahan untuk penelitian generalisasi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode time series dalam menentukan kurun waktu pengambilan data, yaitu pada tahun 2018-2020. Hal tersebut bertujuan untuk mengetahui perkembangan dari proses pelaksanaan Program Keluarga Harapan, apakah sudah berjalan sesuai target atau belum.

Menurut (Indriastuti, 2013) time series ialah sekumpulan data masa lalu yang dicatat secara terus-menerus sebagai sarana untuk menggambarkan perkembangan suatu kegiatan tertentu dan memungkinkan kita untuk mengetahui perkembangan suatu atau beberapa kejadian serta hubungan atau pengaruhnya terhadap kejadian lainnya, dan seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan dari perubahan tersebut dan dapat sebagai pandangan untuk pengambilan keputusan.

1.9.7. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021-selesai dengan mengambil data tahun 2018-2020 . Penelitian akan dilaksanakan oleh peneliti di Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul yang beralamat di Jl.Jendral Sudirman No.44, Bantul Warung, Kapanewon Bantul, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.9.8. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penelitian dikumpulkan dari berbagai sumber. Penelitian ini menggunakan sumber data yang terbagi menjadi dua jenis yaitu:

1. Menurut Umi Narimawati (2008:98) dalam (Pratiwi, 2017) menyebutkan bahwa data primer adalah data yang berasal dari

sumber asli atau pertama. Data ini tidak tersedia dalam bentuk terkompilasi ataupun dalam bentuk file-file.

2. Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, tetapi melihat orang lain atau dengan dokumen (Sugiyono, 2013:225) dalam (Singestecia et al., 2018).

1.9.9. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Metode yang digunakan yaitu :

1. Menurut (Nurjanah & Anggraini, 2020) metode observasi yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung. Teknik observasi tersebut digunakan dalam pengumpulan data secara langsung mengenai pelaksanaan Program Keluarga Harapan.
2. Menurut (Ahsanulhaq, 2019) wawancara adalah teknik penelitian yang dilaksanakan dengan cara dialog baik secara langsung maupun tidak langsung (tatap muka) maupun melalui media tertentu antara pewawancara dengan yang diwawancarai sebagai sumber data. Wawancara tersebut telah dipersiapkan secara cermat oleh peneliti untuk mendapatkan informasi yang relevan dari pengelola Program Keluarga Harapan dan para anggota penerima bantuan Program Keluarga Harapan. Menurut (Heryana, 2018) Pengertian informan yaitu subyek penelitian

yang dapat memberikan informasi terkait permasalahan yang diangkat dalam penelitian. Jenis informan dalam penelitian kualitatif dibagi menjadi tiga yaitu :

- a. Informan kunci ialah, informan yang mengetahui secara menyeluruh terkait permasalahan dalam penelitian yang meliputi kondisi masyarakat secara garis besar.
- b. Informan utama ialah, informan yang memiliki informasi secara detail terkait permasalahan yang diangkat dalam penelitian.
- c. Informan pendukung ialah, informan yang hanya memberikan beberapa informasi tambahan terkait penelitian yang sedang dilakukan oleh peneliti.

Tabel 1.6
Subjek Penelitian

No	Jabatan	Jumlah
1.	Koordinator UPPKH Kapanewon Bantul	1
2.	Pendamping PKH Kapanewon Bantul	3
3.	Koordinator PKH Kabupaten Bantul	1
4.	Jawatan Sosial Kapanewon Bantul	1
5.	Keluarga penerima manfaat PKH Kapanewon Bantul	4

Tabel 1.6 Subjek Penelitian 1

3. Menurut (Herlinda et al., 2021) dokumentasi adalah instrumen yang juga sangatlah dibutuhkan dalam pengumpulan data. Dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan data yang sesuai atau valid mengenai informasi yang dibutuhkan peneliti. Teknik dokumentasi dalam penelitian ini digunakan untuk memperoleh data tentang gambaran umum Program Keluarga Harapan Di Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul, dan data-data lain terkait dengan Program Keluarga Harapan Di Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul.

1.9.10. Analisis Data

1. Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang berguna untuk mempertajam, mengklasifikasikan, dan mengarahkan sehingga memvalidasi kesimpulan yang pasti (Rachmawati et al., 2020). Reduksi data dalam penelitian ini diperoleh dari data-data pendukung topik penelitian, yaitu laporan dan hasil wawancara

dari pelaksanaan Program Keluarga Harapan di Kapanewon Bantul Kabupaten Bantul.

2. Menurut (Nur Muhammad Adam, 2020) penyajian data merupakan penataan data yang telah diseleksi dan diklasifikasikan ke dalam kode agar lebih mudah di analisis. Pengodean didasarkan pada para penutur yang terdapat dalam persidangan. Dalam penelitian ini penyajian data yang telah diperoleh peneliti menggunakan uraian naratif perbandingan pelaksanaan di lapangan dan perundang-undangan terkait Program Keluarga Harapan.
3. Menarik Kesimpulan/Verifikasi menurut (Sugiyono, 2011) dalam (Fadillah, 2019) menjelaskan bahwa penarikan kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.